



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PROSEDUR PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA
(Studi Komperatif Undang-Undang No.1 Tahun 1974
Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga
Islam Negeri Selangor 2003)**

SKRIPSI



Oleh

**MOHAMAD NAZREEN NAIM BIN MANSOR
11623104540**

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**



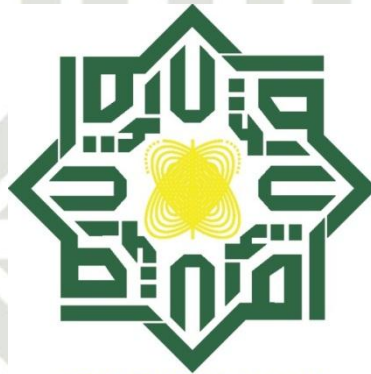
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PROSEDUR PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA
(Studi Komperatif Undang-Undang No.1 Tahun 1974
Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga
Islam Negeri Selangor 2003)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**MOHAMAD NAZREEN NAIM BIN MANSOR
11623104540**

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *PROSEDUR PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA STUDI KOMPERATIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DENGAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI SELANGOR 2003*, yang ditulis oleh :

Nama : Mohamad Nazreen Naim Bin Mansor
 Nim : 11623104540
 Program Studi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk disajikan dalam sidang Munaqashah Falkutas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Pekanbaru, 17 Muharam 1441H
 17 September 2019

Pembimbing Skripsi

Drs. Arifuddin, MA
NIP. 196412311994021004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **PROSEDUR PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KOMPERATIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI SELANGOR 2003)** yang ditulis oleh :

Nama : **MOHAMAD NAZREEN NAIM BIN MANSOR**
 NIM : 11623104540
 Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 6 November 2019
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Darmawan Tia Indrajaya, MA

Sekretaris

Marzuki, MA

Penguji I

Ahmad Adri Riva'i, MA

Penguji II

Dr.H. Erman Ghani, M.Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Ya Allah SWT...

Ketika hidup fakir sebagai insan musafir, sungguh-banyak ujian kecintaan-Mu terhadap ku,

Walau dalam kesamaran gelita, ku hayun jua kaki ini demi mencari sinar kilauan cahaya yang berselindung disebalik liku-liku onak duri keperitan dan airmata,

Walau dalam lelah, bersama sisa kudrat ini ku melangkah jua dengan berbekalkan tawakal ke Illahi dan doa restu yang tidak putus dari kedua insan tersayangku.

Ya Rabbi...

Kadang ketika hamper rebah tersungkur, ku pujuk hati ini dengan "La Tahzan, Innallaha ma'na",

Ya Rahman..

Atas rahmat dan kasih sayang-Mu, ku ingin menghadiahkan kebahagiaan dan kejayaan ini untuk dipersembahkan kepada ayahku Shafei bin Abdullah dan Ibuku Habibah binti Hassan..

Buat ayahku dan Ibundaku..

Kasih sayang dan besar pengorbananmu, takkan pernah bisa terbalas hingga hujung waktu, Seluruh keluargaku dan orang-orang yang ku amat sayangi... Ya Allah SWT

Bahagiankanlah mereka semua..

Ya Illah...

Kami berlindung kepada-Mu dari setiap rasa takut yang mendera, hanya kepada-Mu kami bersandar dan bertawakal,

Cukuplah engkau sebagai pelindung ku, karena engkaulah sebaik-baik pelindung dan penolong.

AAMIN.. YA RABBAL ALAMIN...

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***“PROSEDUR PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KOMPERATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI SELANGOR 2003)”***.

Talak merupakan satu hal yang disyariatkan dalam Islam. Islam mengizinkan talak tetapi Allah SWT sangat membenci perceraian. Perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami isteri ketika memang tiada jalan keluar lainnya bagi mempertahankan rumahtangga yang dibina. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 229 dinyatakan “talak (yang dapat dirujuk) ada dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. Di dalam satu sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak”.

Bagi memastikan hal berkaitan perceraian ini dilakukan dengan benar Negara telah mengatur undang-undang yang berkaitan dengan perceraian bagi menjaga hak wanita agar tidak sebarangan dijatuhkan talak oleh suami. Di Negara Indonesia ada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkahwinan menyebut dalam pasal 39 perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Manakala di Negara Malaysia pula ada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 disebut dalam seksyen 47 seseorang suami atau seorang isteri yang hendak bercerai hendaklah menyerahkan satu permohonan untuk perceraian kepada Mahkamah dalam borang yang ditetapkan disertai dengan suatu akuan berkanun. Walaupun kedua-dua Negara mempunyai peraturan mengenai perceraian harus dilakukan dihadapan Pengadilan namun masih banyak pasangan yang melakukan perceraian tanpa melalui pengadilan atau tanpa izin pengadilan. Dengan ini menarik penulis untuk mengkaji tentang pelanggaran hukum ini.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu apa saja prosedur perceraian yang berlaku di kedua Negara Indonesia dan Malaysia. Apakah status bagi perceraian yang berlaku diluar Pengadilan atau tanpa kebenaran pengadilan. Apakah akibat daripada terjadi hal perceraian di luar pengadilan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode kepustakaan. Data-data yang terkumpul bersumber dari data primier yaitu dari buku-buku bacaan yang berkenaan undang-undang bagi kedua-dua Negara dan data sekunder yaitu dari peneliti peroleh dari kasus-kasus yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komperatif.

Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa undang-undang yang diguna di Negara Indonesia lebih mudah difahami dan mudah dipraktekan karena perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak sah menurut hukum Negara. Jika hal ini terjadi akan memberi efek kepada pasangan tersebut untuk melakukan pernikahan selanjutnya. Berbanding Malaysia diamana terdapat seksyen 125 menyatakan perceraian diluar mahkamah dianggap satu kesalahan yang boleh didenda Rm 1000 atau penjara. Tetapi peraturan tersebut masih lagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuat untuk menghalang berlakunya perceraian diluar pengadilan karena angka perceraian diluar pengadilan khusus di Malaysia semakin meningkat setiap tahun. Hal ini mungkin disebabkan sanksi yang dikenakan hanya denda RM 1000 bukannya penjara.

Masyarakat dikedua Negara seharusnya lebih mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah karena di Negara Indonesia perceraian di luar pengadilan dianggap tidak sah makanala di Negara Malaysia perceraian diluar pengadilan dianggap satu kesalahan. Undang-undang yang dibuat oleh kedua Negara ini bukanlah untuk menghalang perceraian tetapi sebagai menjaga keluarga dan menjaga kemaslahatan masyarakat.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, di atas limpahan dan kurunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul “Prosedur Perceraian Di Indonesia dan Malaysia Studi Komperatif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 ini bagi memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayanhanda Mansor Bin Mohd dan Ibunda tersayang Mahani Binti Shahidin @ Mokhtar yang telah mencurahkan segenap cinta dan saying serta perhatian moral maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penghargaan dan terima kasih kepada juga penulis sampaikan kepada :

Yang disanjung dan dihormati ayahanda tercinta Mansor Bin Mohd, ibunda yang teramat kasihi Mahani Binti Shahidin @ Mokhtar dan adik-beradik yang senantiasa memberi dukungan terhadap diriku ini, serta seluruh keluarga besar yang dengan tulus dan ikhlas serta segala pengorbanan cinta dan doa yang telah diberikan kepadaku dengan kesabaran, ketabahan, kasih sayang dan tidak putus dalam mendampingi dengan kata-kata semangat dan motivasi serta mendoakan kebahagiaanku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III yang telah bersedia mempermudah skripsi ini.

4. Bapak Darmanwatya Indarajaya, MA selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah mempermudah urusanku dalam menyelesaikan pengurusan skripsi ini.

5. terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Bapak Drs. Arifuddin, MA selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak awal sampai selesai karya ilmiah ini.

6. Bapak Henri Sayuti, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi
Kepada semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir, seluruh karyawan atau karyawan Fakultas Syariah, Perpustakaan Uin Suska, dan Perpustakaan Wilayah serta Perpustakaan lainnya yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin.

Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah mendampingi dan membantu yaitu Sofwan, Arrazi, Syahmi, Syawal, Faqih, Yuswira, Nasrullah, Amir, Husaini, Shahidan, Sirajuddin, Hadi, Fidauddin dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlu lembar yang luas untuk nama yang tak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian. Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya jasa dan budi kalian dengan balasan yang berlipat ganda.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kemampuan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangatlah mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga berharap bahwa karya tulis ini dapat memberi manfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan usaha yang penulis lakukan dalam penyusunan ini mendapatkan balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah.

Pekanbaru, 11 September 2019

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGER SELANGOR 2003	
1. UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974	
A. Bingkai Historis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974..	14
B. Masa Penjajahan.....	14
C. Masa Kemerdekaan dan Orde Lama	16
D. Masa Orde Baru dan Kelahiran UU Perkahwinan	18
E. Prinsip-Prinsip Dasar Dalam RUU Perkahwinan.....	20
2. SEJARAH SINGKAT ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI SELANGOR 2003	
A. Bingkai Historis.....	21
B. Visi, Misi dan Objektif Jabatan Kehakiman Syariah Selangor.....	25
C. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syariah Selangor	26
D. Gambaran Carta Organisasi Mahkamah Tinggi Syariah Selangor	28



BAB III KONSEP TALAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Talak Dari Segi Etimologi, Terminologi Dan Hukum Islam	30
B. Dasar Hukum Talak	31
C. Macam-Macam Talak	33
D. Rukun Dan Syarat Talak	35
E. Prosedur Talak Dalam Hukum Islam	38
F. Hikmah Talak	45

BAB IV ANALISIS PROSEDUR PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

A. 1.1 Prosedur Perceraian Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkahwinan	46
1.2 Prosedur Perceraian Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003	48
B. 2.1 Status Talak Apabila dilafazkan diluar Pengadilan Khusus di Indonesia	50
2.2 Status Talak Apabila dilafazkan diluar Pengadilan Khusus di Malaysia	52
C. Analisi Prosedur Perceraian di Indonesia dan Malaysia	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan fitrah manusia, yang dengan melakukan hal tersebut seorang suami diwajibkan memikul amanah tanggungjawab yang sangat besar di dalam dirinya terhadap orang-orang yang berhak mendapat perlindungan dan pemeliharaan. Hakikat perkawinan merupakan hubungan hukum antara subjek yang mengikat diri dalam perkawinan tersebut yakni antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan sah dilakukan pemeluk agama Islam apabila dilakukan mengikut dasar-dasar aturan perkawinan Islam¹.

Pada saat ini, masyarakat melakukan pernikahan karena ingin memenuhi kebutuhan biologisnya secara kodrat memang harus disalurkan. Pembentukan institusi keluarga Islam bertitik-tolak daripada perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan antara lelaki dan perempuan melalui akad nikah yakni ijab dan qabul. Firman Allah dalam surat An-Nisa` ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ يَدْفَعُ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Maka kahwinlah kamu mana-mana yang baik bagi kamu daripada wanita dua,tiga atau empat. Maka sekiranya kamu khawatir bahwa kamu tidak dapat berlaku adil maka cukuplah seorang sahaja². (An-Nisa` : 3)

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cet 2, (Jakarta : Kencana , 2012) h.284

² Surat An-Nisaa` ayat 3, Quran dan Terjemahan ,Depag



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam merupakan agama universal karena tiada suatu masalah dalam kehidupan ini tidak dijelaskan oleh Islam. Dalam hal perkawinan Islam telah berbicara banyak hal bermula daripada mencari kriteria calon-calon yang bakal menikah bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan apabila pernikahan itu tidak dapat diteruskan.

Nikah dari segi bahasa bermaksud ikatan atau simpulan. Syarak pula menjelaskan bahwa nikah adalah suatu ikatan atau akad yang menghalalkan peraulan dan membataskan hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun temurun serta melestarikan agama Allah di persada bumi pertiwi ini³. Sabda Nabi Muhammad SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah bersabda. "Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandang dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena peasa dapat menahan syahwatnya."⁴ (H.R Bukhari dan Muslim)

Dalam membina rumah tangga, seringkali dijumpai berbagai masalah dan kelainan yang dapat saja berujung pada terjadinya perceraian yang kemudian menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Oleh kerana tidak semua mampu

³ Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, cet.1 (Yogyakarta : Menara Kudus, 2002), h.43

⁴ Al-Imam Abi`Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibn al-Mugiral Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Kitab An-Nikah (Beirut: Dar Al-Fikh,1981) VI : 117, Hadist dari Abd Ar-Rahman Ibn Yazid dari Abdullah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga dan mempertahankan perkawinan, dalam Islam juga telah diatur atau diberikan solusi bagaimana cara bagi menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan talak. Dahulu, perceraian mungkin merupakan suatu hal yang tabu dan aib bagi pihak-pihak yang terlibat tetapi kini perceraian merupakan suatu fenomena didalam masyarakat kita.

Perceraian atau talak adalah pemutusan hubungan suami isteri dari hubungan pernikahan yang sah menurut aturan agama Islam dan juga hukum Negara. Perceraian dianggap sebagai langkah terakhir yang diambil oleh pasangan suami isteri bagi menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Menurut syariat Islam, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya perkawinan diantara pasangan suami isteri maka dengan ini telah gugur hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri. Dalam arti kata lain, mereka tidak lagi boleh berhubungan sebagai suami isteri, menyentuh atau berduaan seperti mana mereka sewaktu menikah dahulu. Talak ini merupakan suatu yang disyariatkan⁵.

Islam memang mengizinkan perceraian, tapi Allah SWT membenci perceraian itu. Bercerai didalam Islam merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami isteri ketika memang tidak ada jalan keluar lainnya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 :

أَلْطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ... ﴿٢٢٩﴾

Artinya :Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.⁶. (Al-Baqarah : 229)

⁵ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga* cet. 5 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), h.247

⁶ Surat Al-Baqarah ayat 229, Quran dan Terjemahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama sepakat membolehkan talak karena bisa saja sebuah rumah tangga mengalami pergolakan atau keretakan yang mengakibatkan pernikahan mereka berada didalam keadaan kritis, terancam perpecahan serta pertengkarannya yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Walaupun perbuatan perceraian ini hanya dilakukan tetapi ia merupakan suatu perkara yang tidak disukai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ"

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Katsir Bin `Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Khaalid, dari Mu`arrif Bin Waashil, dari Muhaarib Bin Ditsaar, dari Ibnu `Umar r.a, dari Nabi S.A.W beliau bersabda “ perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak.”⁷ (H.R Abu Daud)*

Hadist diatas menjelaskan bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak⁸.

Secara keilmuan, semua ulama Islam sepanjang zaman sepakat untuk tidak menjatuhkan talak secara semena-mena⁹. Selain karena talak atau perceraian itu merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang tidak jarang juga perceraian ini menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang.

⁷ Sunan Al-Kubraa 7/320 ; Sunan Ash-Shaghiir no. 2786

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet 4 (Jakarta : Kencana, 2010) h.212

⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2004) h.177



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi melindungi hak-hak wanita agar tidak sebarangan dijatuhkan talak oleh suami maka Negara telah membuat undang-undang atau aturan bahwa talak seharusnya dijatuhkan melalui pengadilan. Di sini, dapat dilihat setiap Negara mempunyai proses atau cara yang tersendiri dalam menyelesaikan masalah perceraian tersebut.

Perceraian yang berlaku di Indonesia yang melibatkan orang yang beragama Islam biasanya akan diajukan ke Peradilan Agama. Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur mengenai perceraian di Negara Indonesia :

1. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 39
2. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
3. Kompilasi Hukum Islam¹⁰

Didalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik membahas mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana didalam undang-undang ini telah mengatur mengatur mengenai segala hal bermula dari pernikahan hingga ke hak jagaan anak. Selain itu, undang-undang ini juga merupakan undang-undang utama yang digunakan dalam pengaturan mengenai pernikahan perkawinan sehingga pelaksanaan perceraian dan pengaturan selepas perceraian yang berlaku di Negara Indonesia.

Hal ini juga hampir sama di Malaysia yang mana peradilan agamanya disebut sebagai Mahkamah Syariah. Di Malaysia Undang-Undang keluarga Islam diatur didalam Enakmen Keluarga Islam Negeri yang mana setiap negeri di Malaysia mempunya pengaturannya sendiri¹¹. Seperti mana Negeri Selangor yang

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Humaniora Press, 1992)

¹¹ Hertina, Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara, (Riau : Suska Press, 2014) h. 108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mana telah terdapat Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 telah mengatur mengenai segala hal bermula dari peminangan hingga ke hak jagaan anak. Perkara ini telah memberikan kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk menyelesaikan masalah kekeluargaan seperti nikah kahwin, perceraian, talak, fasakh dan sebagainya¹².

Didalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003 telah ditetapkan segala macam hal mengenai perceraian yang dapat dijumpai di bahagian V yaitu mengenai pembubaran perkawinan. Dalam bahagian ini telah ditetapkan peraturan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan pembubaran sesuatu perkawinan bermula daripada seksyen 45 sehingga seksyen 59¹³.

Negara Indonesia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkahwinan menyatakan dalam pasal 39 “*perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak*”. Manakala Negara Malaysia dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 menyatakan dalam seksyen 47 “*seorang suami atau isteri yang ingin melakukan perceraian hendaklah menyerahkan permohonan bertulis kepada mahkamah dalam borang yang ditetapkan berserta akuan berkanun*”. Hal ini menunjukkan kedua Negara menyatakan perceraian hanya sah apabila berlaku di dalam sidang pengadilan.

¹² https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia, 11 oct 2018, 1119am

¹³ Mahkamah Syariah Selangor, *Enakmen Undang-Undang Islam Negeri Selangor 2003 Dan Kaedah-Kaedah*, (Selangor: MCLJ, 2003)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Perbedaan mengenai kedua-dua undang-undang ini adalah di Negara Indonesia tidak mempunyai peraturan tentang pelanggaran talak yaitu menjatuhkan talak di luar pengadilan atau tanpa kebenaran pengadilan. Berbeda dengan Malaysia yang menyatakan dalam seksyen 125 “*talak di luar pengadilan merupakan satu kesalahan yang boleh dihukum sebanyak RM 1000 dan penjara 6 bulan*”.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti dengan judul “**Prosedur Perceraian di Indonesia dan Malaysia (Studi Komperatif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003)**”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pada masalah yang diuraikan pada latar belakang masalah, maka penulis membatasi penelitian ini dengan tentang proses perceraian yang dijalankan di Indonesia menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Malaysia menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Status perceraian yang dilafazkan atau dilakukan di luar sidang pengadilan sama ada di Indonesia menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Malaysia menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana prosedur perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003?

Bagaimanakah status perceraian yang dilakukan di luar pengadilan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui cara pelaksanaan perceraian yang sebenarnya menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003.
- b. Untuk mengetahui ketentuan hukum bagi perceraian yang dilakukan di luar pengadilan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam bagi pasangan yang bercerai pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003.

Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan memperdalamkan khazanah pengetahuan penulis tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 berkaitan apa saja prosedur perceraian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dapat dijadikan pedoman dan bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi penulis untuk yang akan datang.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi strata S1 pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab undang-undang, maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan dengan meneliti bahan pustaka atau data primer dan sekunder saja. Selain itu penelitian ini dilaksanakan terhadap kajian kasus yang berlaku di Negara Indonesia dan Malaysia. Penulis memilih dua Negara berjiran yang sama-sama mempunyai aturan mengenai undang-undang Islam masing-masing.

Sumber Data

Penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tersedia di perpustakaan, sumber data sekunder tersebut terdiri dari tiga bahan hukum:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat didalam penelitian ini yaitu dengan rujukan utama terhadap Undang-Undang Negara Indonesia yang bersumber daripada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Negara Malaysia yang bersumber Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti Fiqh Munakahat, Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara, Fiqih Sunnah, Hukum Islam Di Indonesia dan banyak lagi.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Al-Quran terjemahan dan Kamus Ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu dengan mempelajari, menganalisa literatur-literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas.

Penelitian ini diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Analisa Data

Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data yang lain yang terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, kemudian tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode komperatif yaitu dengan memperbandingkan suatu dengan hal lainnya sehingga akan sampai pada suatu kesimpulan.

Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Metode Komperatif, yaitu meneliti dan memaparkan perbandingan undang-undang atau aturan yang terdapat didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003 mengenai masalah perceraian.
- b. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003 yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Deduktif, yaitu suatu proses berfikir dengan mengemukakan permasalahan yang bersifat umum, kemudian di bahas kepada permasalahan yang bersifat khusus.



F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan penulisan ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun penulisan ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab ini, dijelaskan tentang tinjauan umum tentang penelitian yang terdiri dari permulaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 yaitu latar belakang, visi misi dan perkara mengenai perceraian dalam kedua-dua undang-undang secara umum.

BAB III: Dijelaskan tentang syariat Islam mengenai perceraian menurut bahasa dan istilah. Tinjauan umum mengenai proses perceraian yang berlaku di kedua-dua Negara yaitu Malaysia dan Indonesia. Pendapat ulama mengenai perceraian.

BAB IV: Pada bab ini, prosedur perceraian menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003. Bagaimana status sekiranya perceraian itu dilafazkan atau dilakukan di luar sidang pengadilan sama ada di Indonesia menurut Kompilasi Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

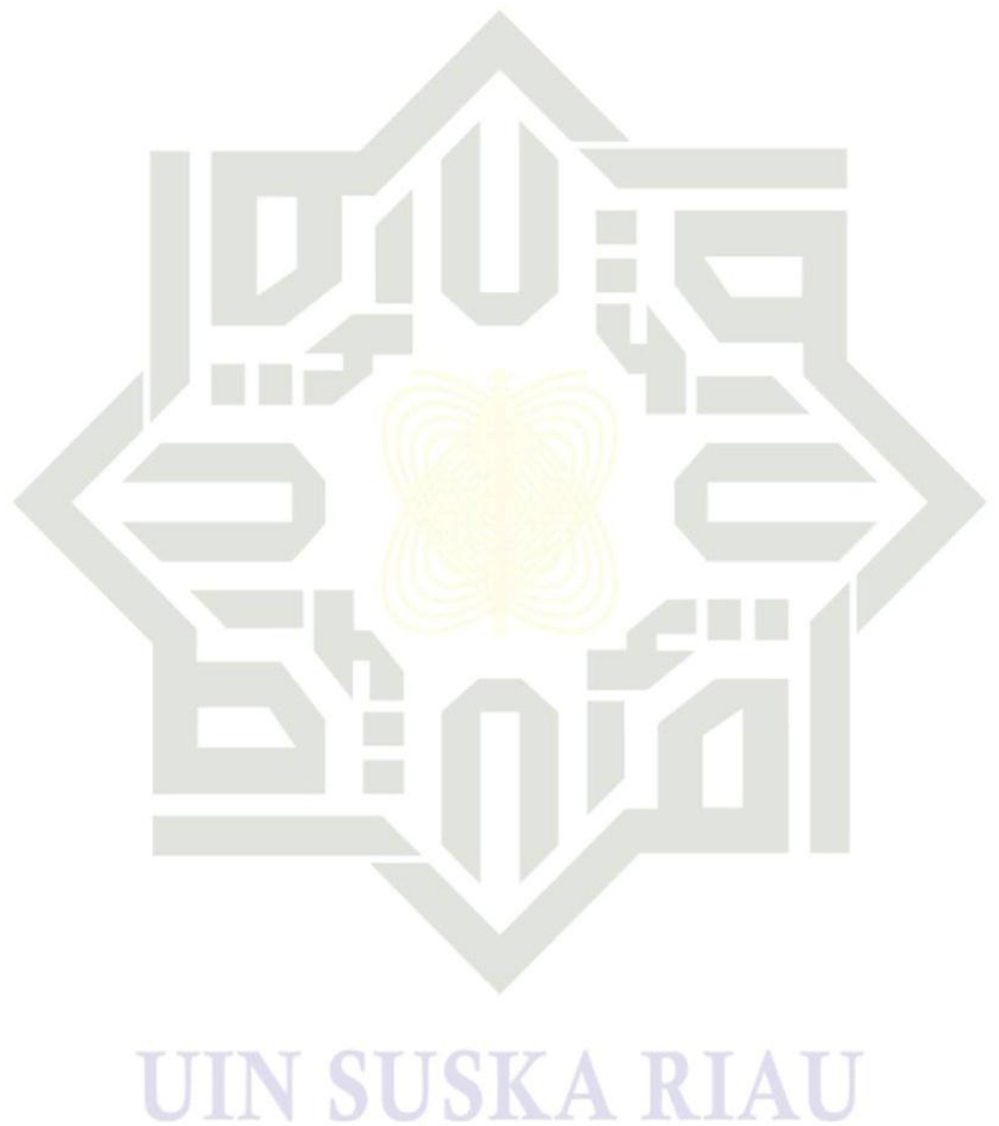
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islam dan Malaysia menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003.

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

UNDANG-UNDANG NO . 1 TAHUN 1974 DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI SELANGOR 2003

A. Undang-undang No. 1 Tahun 1974

1. Bingkai Historis Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Latar belakang historis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum, positif sejak zaman kolonialisme Belanda. Hukum Perkawinan Indonesia tampaknya menarik perhatian besar para pakar hukum karena dalam perdebatan tentang Hukum Perkawinan itu, terlibat setidaknya-tidaknya tiga unsur, yaitu agama, negara dan wanita sebagai akibat dari kuatnya pengaruh Hukum Islam terhadap perumusan dan perkembangan UU Perkawinan.¹⁴

Hukum Nasional Indonesia pada umumnya bersumber dari hukum Barat, hukum Adat dan hukum Islam. Dari ketiga hukum tersebut, Hukum Islam merupakan sumber hukum yang memiliki peluang besar untuk mendominasi mengingat agama Islam memuat nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di kalangan masyarakat nusantara. Di samping itu dalam Hukum Islam, hukum Adat merupakan sumber hukum komplementer sedangkan hukum Barat merupakan hukum yang menggambarkan norma-norma bangsa.

2. Masa Penjajahan

Pada masa kedatangan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) di Nusantara, kedudukan hukum Islam telah melembaga dalam masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Pada masa

¹⁴ Sjamsu Alam, *Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia*, (Universitas Gajah Muda, 2011). Hlm. 147



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan Belanda di Indonesia, Belanda menghimpun hukum Islam yang disebut dengan *Compendium Freiyer*, mengikuti nama penghimpunannya.¹⁵ Setelah itu pemerintahan Belanda juga membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, Makasar dan hukum-hukum lain semasa penjajahan. Setelah VOC berakhir, sekitar pertengahan abad XIX, pemerintah kolonial Belanda mulai memberlakukan pembagian sistem hukum di Indonesia (pada masa itu Hindia Belanda), yaitu antara lain Hukum Adat, Ordonasi (hukum negara belanda), dan BW (Burgerlijk Wetboek?Hukum Perdata yang berlaku bagi orang-orang pribumi keturunan Eropa).¹⁶

Pada Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta mengusulkan kepada Pemerintah belanda agar segera disusun undang-undang perkawinan namun mengalami hambatan dan mengganggu kekompakan dalam mengusir penjajah.¹⁷

Pada permulaan tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan Ordonasi Perkawinan tercatat (*onwerpordonnantie op de ingeschreven huwelijken*) dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut: Perkawinan berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah

¹⁵ Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 11

¹⁶ Sjamsu Alam, *Op.Cit.*, hlm. 152

¹⁷ Maria Ulfah Subadyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), h. 9-10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh hakim.¹⁸

3. Masa Kemerdekaan dan Orde lama

Membicarakan tentang pelaksanaan hukum Islam pasca kemerdekaan, minimal akan terkait tiga komponen penting dalam tataran konsep mahupun aplikasinya yaitu materi hukum, Department Agama dan Peradilan Agama serta dua masa yang telah melahirkan perundang-undangan terkait, masa Orde Lama dan kedua, Orde Baru¹⁹.

Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan upaya perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU No: 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk bagi masyarakat beragama Islam.

Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlimen, mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana undang-undang perkawinan. Akhirnya Menteri Agama membentuk Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Kepanitiaan itu dibentuk berdasarkan Surat Penetapan Menteri Agama No B/4299 tanggal 1 Oktober 1950. Disamping itu dibuat peraturan-peraturan khusus untuk masing-masing golongan. Sehingga tanggal 1 Desember 1952 panitia menyampaikan Rancangan UU Perkawinan Peraturan Umum baru.

¹⁸ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), h. 27

¹⁹ Wahidin, *Pengantar Sejarah Peradilan Islam* (Riau : Suska Press, 2014), h. 209

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Ruu itu diatur beberapa hal penting di antaranya:

Perkawinan didasarkan atas kemauan kedua belah pihak, batas umur ditetapkan 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita.

Poligami diizinkan jika dibolehkan oleh hukum agama, dengan catatan harus berlaku adil yang dinyatakan dihadapan pegawai pencatat nikah.

Harta benda dan syarat-syarat perceraian.²⁰

Kemudian Panitia dalam rapatnya bulan Mei 1953 memutuskan untuk melakukan beberapa hal:

Menyusun RUU pokok yang pendek saja dan berlaku untuk umum dengan tidak menyinggung agama.

- Menyusun RUU organik yang mengatur perkawinan menurut agama masing-masing yaitu bagi golongan Islam, Katolik dan Protestan.
- Menyusun Ruu untuk golongan yang tidak termasuk salah satu golongan agama tersebut.²¹

April 1954 panitia menyampaikan RUU tentang perkahwinan umat Islam kepada Menteri Agama namun respon yang diberikan Departemen Agama sangat lambat. Baru pada tahun 1957 Menteri Agama mengajukan RUU tentang perkawinan umat Islam kepada Kabinet, tetapi masih menunggu amandemen-amandemen baru.²² Setelah usulan itu pemerintah mengajukan RUU Perkawinan Umat Islam kepada DPR. Dalam RUU itu, poligami

²⁰ Maria Ulfah Subadio, *Loc. Cit.*

²¹ Maria Ulfah Subadio, *Loc. Cit.*

²² Yayan Sopyan, *Islam Negara; Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012), hlm. 84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yaitu persetujuan lebih dahulu isteri/isteri-isteri, harus berlaku Adil, dapat menghidupi lebih sari satu keluarga. RUU ini juga mendapat perhatian yang cukup besar di kalangan anggota DPR dan masyarakat.²³

Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep RUU Perkawinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962 Lembaga hukum ini mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian diseminarkan oleh lembaga hukum tersebut pada tahun 1963 bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami namun masih dimungkinkan adanya perkawinan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Serta merekomendasikan batas minimum usia calon pengantin.²⁴

4. Masa Orde baru dan kelahiran UU Perkawinan

Pada tahun 1966 Departemen Kehakiman menugaskan Lembaga Hukum Nasional untuk menyusun RUU Perkawinan yang bersifat nasional yang berlandaskan Pancasila yang hasilnya disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR-GR tanggal 7 September 1968 dalam bentuk RUU tentang Peraturan Perkawinan Umat Islam dengan Amanat Presiden R.02/PES/5/1967 tanggal 22 Mei 1967 dan RUU tentang ketentuan-ketentuan Pokok

²³ *Ibid*, hlm. 85

²⁴ R. Soetedjo Prawirohamidjojo, *pluralisme Dalam Perundangan-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988), hlm. 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerkahwinan melalui surat Amanat Presiden R.010/P.U/HK/9/1968. Tetapi RUU Pernikahan Umat Islam dan RUU pokok Perkawinan belum sempat diselesaikan oleh DPR-GR bersama-sama Pemerintah, sudah kandas di tengah jalan dan nasibnya sama dengan RUU Perkawinan yang diajukan sebelumnya.²⁵

Pada tahun 1969 masuk juga ke DPR sebuah RUU tentang Perkawinan Campuran. Adapun yang menjadi dasar pemikiran dari RUU ini adalah bahwa sesuai dengan dasar Pancasila yang dapat mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dan sesuai dengan cita-cita pokok pembinaan hukun nasional, dianggap perlu adanya UU Perkawinan Campuran yang berlaku bagi orang-orang yang masing-masing tunduk kepada hukum yang berlainan, karena berlainan kewarganegaraan atau agama. RUU ini terdiri dari 8 bab dan 11 pasal berikut dengan penjelasannya.

Pada tanggal 31 Juli 1973, Presiden menyampaikan kepada DPR-RI rancangan Undang-undang Perkawinan dan menarik kembali rancangan Undang-Undang tentang ketentuan pokok perkawinan. Setahun kemudian tanggal 30 Agustus 1973 menteri kehakiman atas nama Pemerintah menyampaikan keterangan-keterangan pemerintah dan berikutnya disusul dengan pandangan fraksi-fraksi tanggal 17-18 September 1973.²⁶

Setelah melalui kompromi dengan DPR pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU

²⁵ Yayan Sopyan, *Op, Cit.*, hlm. 86

²⁶ Muhammad Kamal Hassan, *Modernisasi Indonesia Respon Cendaiawan Muslim*, (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987), hlm. 191



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan yang di setuju DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No: 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.

5. Prinsip-Prinsip Dasar dalam RUU Perkawinan

UU Perkawinan terdiri dari 14 Bab yang berbagi dalam 67 Pasal. Bab-

bab tersebut adalah :

- a. Dasar Perkawinan
- b. Syarat-syarat Perkawinan
- c. Pencegahan Perkawinan
- d. Batalnya Perkawinan
- e. Perjanjian Perkawinan
- f. Hak dan Kewajiban Suami Isteri
- g. Harta benda dalam Perkawinan
- h. Putusnya Perkawinan serta Akibatnya
- i. Kedudukan Anak
- j. Hak dan Kewajiban antara anak dan orang tua
- k. Perwalian
- l. Ketentuan-ketentuan lain
- m. Ketentuan Peralihan
- n. Ketentuan Penutup

Secara umum UU Perkawinan memiliki beberapa prinsip dasar.

Prinsip-prinsip ini merupakan asas bagi terjaminnya cita-cita luhur dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan. Dari UU ini diharapkan supaya pelaksanaan perkawinan dapat lebih sempurna dari masa yang sudah-sudah. Adapun prinsip-prinsip perkawinan itu adalah asas sukarela, asas partisipasi keluarga, asas Perceraian dipersulit, Poligami dibatasi secara ketat, kematangan calon mempelai dan memperbaiki derajat wanita.²⁷

B. Sejarah Singkat Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003

1. Bingkai Historis

Malaysia merupakan salah satu Negara yang bercirikan khas Melayu serta menjadikan Islam dan Undang-Undang Melayu sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan dalam bernegara²⁸. Masuknya Islam di Malaysia tidaklah serentak karena wilayah Malaysia dahulunya terdiri dari 11 kerajaan yang berdaulat dan baru pada tahun 1957 membentuk Negara federal (negeri-negeri Melayu Bersatu). Malaysia memperoleh kemerdekaan dari pihak Inggris pada tahun 1957 setelah sebelumnya dijajah oleh Portugis (1511), Belanda (1641) dan Inggris (1786-1957)²⁹. Akibat kemerdekaan ini menjadikan Islam sebagai agama rasmi di Malaysia.

Agama Islam di Negeri Selangor telah wujud seawal kurun 15 yang telah datang melalui Melaka. Ini karena pada waktu itu Selangor berada di

²⁷ Muahmmad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 157

²⁸ Ahmad Ibrahim, *Common Law In Malaysia, dalam Ketentuan Jurnal Undang-Undang Malaysia*, (Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka 1989), jilid 1. h,3

²⁹ Hamid Jusoh, *Pemakaian Undang-Undang Islam Kini dan Masa Depan nya di Malaysia dalam al-Ahkam, Undang-Undang Malaysia Kini*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), Jilid 1 h,67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibawah takluk jajahan Melaka. Pada zaman pemerintahan Melaka, telah wujud jawatan kadi. Sejarah wujudnya mahkamah syariah di negeri Selangor pula telah muncul pada kurun ke - 17³⁰.

Pada tahun 1884, Majlis Mesyuarat Negeri Selangor telah mengiktiraf jawatan kadi dan imam, seterusnya mengambil keputusan untuk melantik seorang kadi untuk menyelesaikan segala masalah hukum-hukum agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Pada waktu itu juga DYMM Sultan Selangor telah melantik seorang kadi disebut sebagai “Kadi Selangor” dengan memberi gaji sebanyak RM 900.00 per tahun dan period ini hanya berlaku sehingga tahun 1892 dan kemudiannya jawatan tersebut diganti namanya kepada “Chief Kadi”³¹.

Undang-undang Mencegah Berzina Tahun 1894 (Prevention of Adultery Regulation 1894) adalah undang-undang pertama yang dikanunkan di negeri Selangor. Diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negeri Selangor pada 26hb.September, 1894 dan undang-undang ini hanya berkuatkuasa untuk orang Islam sahaja. Menurut undang-undang ini, seorang laki-laki yang melakukan hubungan kelamin dengan seorang perempuan yang telah bersuami adalah bersalah dan boleh dihukum 2 tahun penjara bagi laki-laki dan 1 tahun penjara bagi perempuan dan mungkin kedua-duanya di kenakan denda. Dalam masalah ini mahkamah akan bertindak ke atas laporan yang dibuat oleh suami

³⁰ Abdul Kadir bin Haji Muhammad, *Sejarah Penulisan Undang-Undang Selangor*, (Selangor: Pustaka Ehsan, 2002), h.66.

³¹ Ibid.,h.67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan itu atau orang lain yang bertanggungjawab atas perempuan itu di mana sekiranya suaminya tiada³².

Pada tahun 1900 pula, Majlis Mesyuarat Negeri telah meluluskan Undang-undang Pendaftaran Nikah Kahwin dan Cerai Orang-Orang Islam 1900 (Muhammadan Marriage and Divorce Registration Enactment 1900) yaitu undang-undang berhubung dengan nikah kawin dan cerai orang-orang Islam di negeri Selangor. Undang- undang ini memperuntukkan suami atau wali hendaklah melaporkan perkawinan kepada kadi atau wakil kadi daerah dalam waktu 7 hari selepas akad nikah dan kadi atau wakilnya hendaklah mendaftarkannya dan mengeluarkan surat perkawinan. Begitu juga dengan perceraian, hendaklah dilaporkan kepada kadi dalam waktu 7 hari sesudah bercerai dan surat cerai akan dikeluarkan kepada mereka yang berkenaan. Sekiranya ini tidak dipatuhi, tindakan boleh diambil dengan dikenakan sanksi tidak melebihi daripada RM 25.00. Dengan adanya undang-undang tersebut dan untuk membicarakan hal nikah kawin dan cerai, maka diadakan mahkamah kadi³³.

Pada tahun 1900 juga, jawatan kadi mula diperluaskan ke daerah-daerah dalam negeri Selangor dan pada tahun 1922 tiap-tiap daerah ada kadinya masing-masing, yaitu daerah Klang, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Ulu Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Kuala Kubu dan Rawang³⁴.

³² Ibid, h.68.

³³ Ibid., h.69-71.

³⁴ Ibid, h.74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1948 Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah ditubuhkan, dengan itu usaha menggubal undang-undang telah dilakukan dan menghasilkan Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No. 3 tahun 1952 dengan nama Enakmen Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No. 3 tahun 1952 dan mula dikuatkuasakan pada 5 Desember, 1952. Dengan adanya undang-undang ini maka termansukhlah undang-undang terdahulu daripadanya. Sehingga ke hari ini undang-undang ini telah mengalami pindaan sebanyak 7 kali yaitu pada tahun 1969, 1960, 1961, 1962, 1966, 1972 dan pada 1979. Pindaan ini dibuat berkaitan dengan urusan mengemaskinikan pentadbiran hal ehwal Islam di negeri Selangor³⁵.

Pada tahun 1984 Undang-undang Keluarga Islam Selangor No. 4 tahun 1984 telah diluluskan dan dikuatkuasakan pada 23 Januari, 1989 di seluruh negeri Selangor. Perlaksanaan Undang-undang ini telah memansukhkan bahagian ke 6, 7seksyen 155, 156, 158, 160 dan 178 perenggan (n) Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No. 3 tahun 1952³⁶.

Pada tahun 1989 Enakmen Perundangan Islam Selangor No. 2 tahun 1989 telah diluluskan. Berdasarkan enakmen inilah Mahkamah Syariah Selangor ditubuhkan secara rasmi dan berasingan dari Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Pada tahun 1991, Enakmen Kanun Prosedur Jenayah Syariah Selangor No. 6 tahun 1991 dan Enakmen Kanun Prosedur Mal Syariah Selangor No. 7 tahun 1991 telah diluluskan dan mula dikuatkuasakan pada 1hb. September, 1991. Mulai dari tanggal itu Mahkamah Syariah Selangor telah

³⁵ Ibid., h. 76.

³⁶ Ibid., h. 77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diasingkan secara rasminya dari JAIS. Pada tahun 2003 nama Mahkamah Syariah Selangor telah ditukar kepada Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor selaras dengan perkembangan dan peningkatan kualitas perkhidmatannya kepada pelanggan³⁷.

2. Visi, Misi Dan Obyektif Jabatan Kehakiman Syariah Selangor

Adapun Misi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor adalah:

Melaksanakan pengadilan, pengurusan Mahkamah dan perkhidmatan sokongan secara profesional, berkesan dan sistematik berasaskan peruntukan Undang-Undang Islam yang seragam di Selangor untuk mencapai keredhaan Allah ”.

Visi Jabatan Kehakiman Syariah Selangor adalah:

“ Menjadi Institusi Kehakiman Syariah Yang Berwibawa”

Adapun Obyektif Jabatan Kehakiman Syariah Selangor adalah:

1. Menerima dan menyelesaikan kes-kes yang dibawa ke Mahkamah Syariah dengan adil dan saksama mengikut peruntukan undang-undang.
2. Menkuatkuasa dan melaksanakan sistem kehakiman Islam yang teratur dan berkesan.
3. Mengurus kes-kes rayuan syariah secara teratur dan berkesan.
4. Mengurus permohonan pembahagian harta pusaka.
5. Membangunkan sumber manusia yang terlatih dan mencukupi.
6. Memberi perkhidmatan runding cara, pertemuan dan perdamaian.

³⁷ Ibid, h.82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Tugas Dan Fungsi Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor

Kewenangan mengendali di Mahkamah Renda Syariah Shah Alam, Selangor antaranya adalah berikut :

1. Membicarakan kasus-kasus yang diperuntukkan oleh enakmen negeri.
2. Mendengar dan memutuskan kasus-kasus tersebut.
3. Menyediakan kertas-kertas keputusan dan laporan Mahkamah.
4. Membicarakan kasus-kasus diperingkat daerah

Selain Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah juga memiliki kewenangannya tersendiri yaitu:

1. Diproses kasus-kasus ang diperuntukkan oleh enakmen negeri kepadanya.
2. Mengeluarkan perintah kasus-kasus perdata dan pidana.
3. Menyelesaikan dan mengkonformasikan kasus-kasus waris.
4. Menyediakan jurnal Mahkamah untuk diterbitkan(bagi beberapa negeri)

Dan mahkamah Rayuan Syariah (banding), kewenangannya adalah:

1. Bertugas untuk mendengar kasus-kasus rayuan (banding).
2. Mempunyai kuasa pembatalan mana-mana sabitan hukuman oleh Mahkamah Syariah.
3. Mengurangi hukuman.
4. Menerima supaya diadakan pembicaraan kembali atau ulang bicara.
5. Menerima rayuan (banding) tertuduh (Tergugat) yang dihukum penjara atau sanksi tidak kurang dari RM 25.00 (RP 76,000) dan telah membuat permohonan banding sesuai prosedur yang ditetapkan.
6. Setiap permohonan perkara banding akan didengar sekurang-kurangnya oleh tiga penal (hakim) rayuan daripada penal (hakim) Rayuan Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dirujuk dan disahkan KDYMM Sultan (Ketua Hakim adalah Ketua Penal Rayuan Syariah). Keputusan Mahkamah adalah sah dan mutlak³⁸.

Suatu enakmen mempunyai otoritas untuk mengubah dan menyatukan Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjaga dan permasalahan lain yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Enakmen ini disebut sebagai Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003. Enakmen ini harus diberlakukan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor melalui pemberitahuan dalam warta, media massa dan cetak. Enakmen ini berlaku untuk semua orang Islam yang tinggal dalam negeri Selangor dan bagi semua yang bermastautin di negeri tersebut tetapi tinggal diluar negeri itu.

Mahkamah Rayuan Syariah (Mahkamah Agung) menangani kasus-kasus mal dan jinayah (pidana) dari Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Tinggi Syariah menangani pembicaraan kasus-kasus jinayah (pidana), mal, faraid pada tingkat banding. Mahkamah Rendah Syariah (Peradilan Agama) menangani kasus pidana dengan hukuman maksimal yang ditentukan oleh undang-undang sebesar RM 5,000.00 atau 3 tahun penjara atau keduanya sekali. Sedangkan untuk perkara yang menyangkut harta benda, sanksinya RM 50,000.00³⁹.

Tugas kerja Jabatan Kehakiman Mahkamah Syariah Shah Alam ialah:

³⁸ Government of Selangor gazette, Warta Kerajaan Negeri Selangor, (Petaling Jaya : Pustaka Aman Press, 2004) h.343

³⁹ Wawancara, Puan Noor Huda Binti Roslan, (Ketua Pendaftar, Mahkamah Syariah Shah Alam Selangor), 22 March 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyediakan dan melaksanakan pengadilan terhadap pelanggaran kasus pidana berdasarkan syari'at dan undang-undang

Menyediakan pelayanan pengadilan yang berkualitas bagi masyarakat.

Menguruskan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan pemberdayaan pada pegawai dan karyawan.

menyediakan layanan teknologi komunikasi dan berbagai instruksi yang terkait dengan lembaga.

Memberikan kemudahan dan layanan yang kompeten.

4. Gambaran Organisasi Jabatan Kehakiman Syariah, Shah Alam Selangor

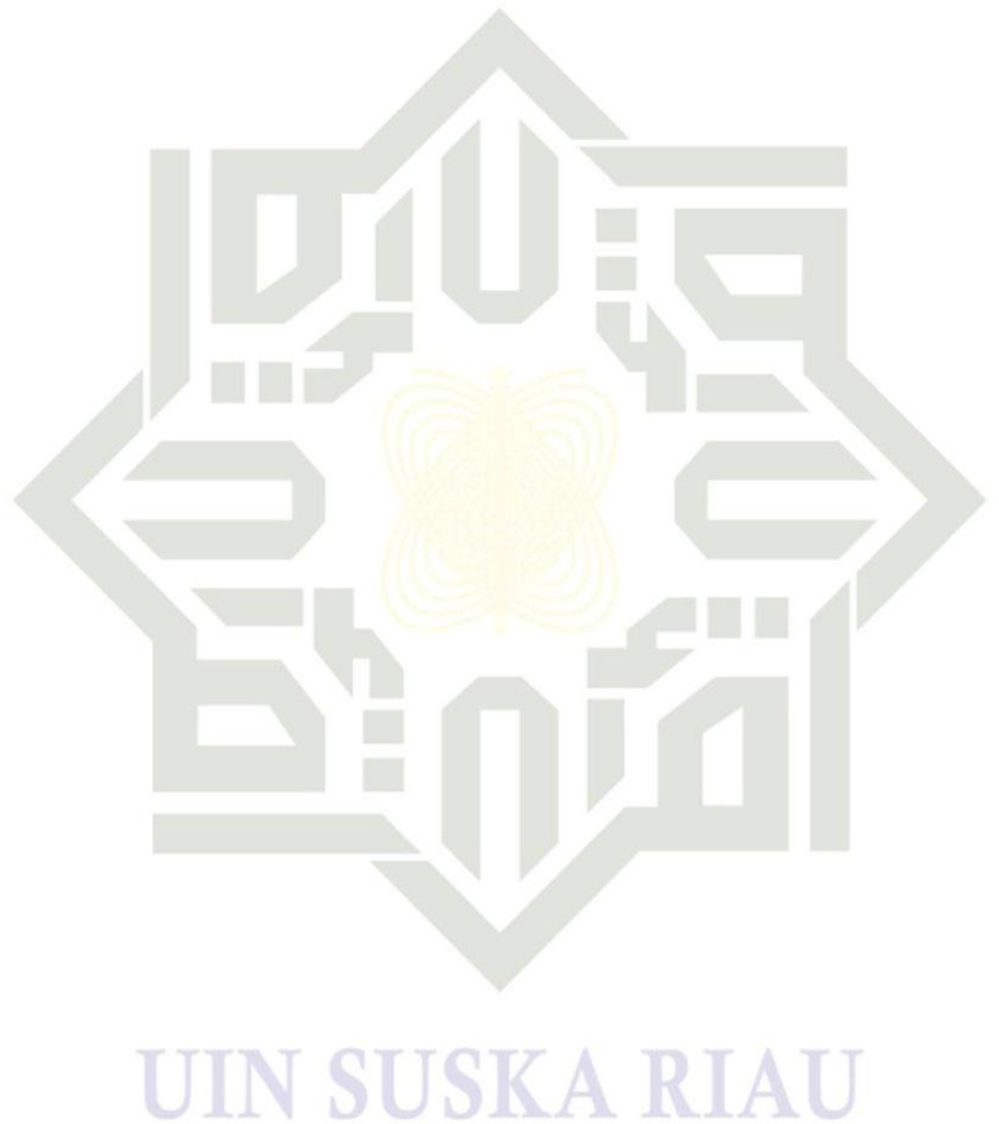
Keterangan :

1. Hakim 1 :Dato Haji Mukhyiddin Bin Ibrahim
2. Hakim 2 :Tuan Mohammad Adib Bin Husain
3. Pembantu Hakim :Puan Rosmahwati Binti Shamsuri
4. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat : Muhammad Isham Bin Ismail
5. Ketua Pendaftar : Puan Norhuda Bt Roslan
6. Pembantu Hakim 2 (s/u) : Norizan Binti Fahrudin
7. Pembantu Pendaftar : Siti Noraini Bt Mohd Ali
8. Pembantu Tadbir (1) : Mohd Razali Bin Hassin
9. Pembantu Tadbir (2) : Zaipul Bin Zainal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 10. Pembantu Tadbir (3) | : Nasha B Tarikat |
| 11. Penghantar Notis | : Shamsuddin Bin Manan |
| 12. Pembantu Am Rendah | : Asnizah Binti Mokti ⁴⁰ |



⁴⁰ Mahkamah Syariah Shah Alam, Selangor, Carta Organisasi Tahun 2013,(Selangor: Perbadanan Nasional Berhad, 2019) h.7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KONSEP TALAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Talak Dari Segi Etimologi, Terminologi dan Hukum Islam

Perceraian dalam Hukum Islam sering disebut dengan istilah talak. Kata talak itu diambil dari kata ithlaq yang berarti melepaskan atau membiarkan⁴¹. Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusannya hubungan suami isteri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada isterinya, dengan kata-kata yang jelas atau sindiran⁴². Adapun talak dalam Hukum Islam adalah suatu terapi atau suatu obat hingga harus dipandang talak sebagai bagian dari solusi tidak dipandang sebagai sebagian problema⁴³.

Terdapat berbagai pengertian mengenai talaq yang telah diberikan oleh fuqaha, diantaranya :

1. Fuqaha Syafie` mengartikan : Talak pada syara` adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan seumpamanya⁴⁴.
2. Fuqaha Hanafi mengartikan : Talak pada syara` adalah memutuskan ikatan pernikahan serta merta (dengan talak ba`in) atau dalam suatu waktu (dengan talak raj`i) dengan menggunakan lafaz tertentu⁴⁵.

⁴¹ Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subusalam Jilid, (Surabaya : Al-Ikhlas,1995) Cet.1, h.609

⁴² Ahmad Shidik, Hukum Talak Dalam Agama Islam, (Surabaya: Putera Pelajar, 2001) Cet.1, h.9

⁴³ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), Cet.1, h.95

⁴⁴ Syeikh Muhammad Al-Khatib Al-Syarbani, Mughni Al-Muhtaj, (Mesir : Matba`ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh,1958), juzuk 3, h.279



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fuqaha Maliki mengartikan : Talak pada syara` adalah menggunkaikan ikatan yang sah melalui pernikahan⁴⁶.

Fuqaha Hanafi mengartikan : Talak pada syara` adalah melepaskan ikatan perkawinan.⁴⁷

Dalam ensiklopedia Islam Indonesia, talak diartikan sebagai pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami secara sepihak dengan menggunakan lafaz talak atau sejenisnya⁴⁸.

B. Dasar Hukum Talak

Agama Islam telah menetapkan kebolehan talak atau perceraian. Banyak sekali ayat-ayat yang membahaskan den menyebut tentang masalah perceraian.

Diantara ayat-ayat tersebut adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata . dan bersaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai

⁴⁵ Muhammad Amin Ibn Abidin, Hasyiyah Radd Al-Mukhtar A`la al-Durr al-Mukhtar, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh,1966) Juzuk 3, h.226-227

⁴⁶ Sidi Muhammad Al-Zarqani, Syarh Muwatta` al-Imam Malik, (Kaherah : Al-Matha`ah al-Khairiyyah) Juzuk 3

⁴⁷ Abi Muhammad A`bdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Al-Mughni, (Mesir: Maktabah al-Jumhurriyyah al-Arabiyah) Juzuk 7, h 96

⁴⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam.(ed), Ensiklopedia Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet.4, Jilid 5, h.53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (An-Nisa,: 19)

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَمِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah :229)

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَسْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُقْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا
ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah : 230)

Didalam hadits juga banyak riwayat-riwayat yang menyinggung masalah talak diantaranya :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْغِضُ الْحَالِلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

Artinya : Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda : perbuatan yang halal yang sangat dibenci Allah⁴⁹ adalah talak. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ أَطْلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

Artinya : diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dai berkata, : “ Talak pada masa Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar serta dua tahun pada masa pemerintahan Umar RA adalah talak tiga yang diucapkan sekaligus dihitung satu. Lalu Umar berkata, “Orang-orang ini ingin menyegerakan urusan yang semestinya mereka berhak untuk memperlambatkannya, sebaiknya kami putuskan saja kepada mereka. “ lalu Umar membuat keputusan bahwa talaq tiga yang diucapkan sekaligus benar-benar berlaku talak tiga.” (HR Muslim)⁵⁰

C. Macam-Macam Talaq

Secara umumnya perceraian itu ada dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak diajukan oleh suami dan cerai gugat diajukan oleh isteri⁵¹. Sedangkan dalam hukum Islam cerai itu sama dengan talak, adapun macam-macam talak yaitu :

1. Talak Raj`i :

Merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, talak pertama atau yang kedua.

⁴⁹ Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subulussalam, (Surabaya, Al-Ikhlash, 1995), Jilid 3, Cet. 1, h.609

⁵⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Mukhtasar Shahih Muslim, Buku 1, (Jakarta : Pustaka Azam, 2003) Cet 1, h.595

⁵¹ Dr. Musthofa Al-Khin, Kitab Fiqih Mazhab Syafi`e, (Kuala Lumpur, Pustaka Salam Sdn Bhd: 2005), Jilid 4, h. 870.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Talak Ba`in

Yaitu talak yang tidak memberi hak rujuk bagi bekas suami terhadap bekas isteri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami, jika ingin kembali bersama harus dengan akad nikah yang baru.

a) Talak Ba`in Sughro adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan suami untuk nikah kembali dengan bekas isteri, artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah yang baru dengan bekas isteri baik dalam masa iddahnya mahupun sudah berakhir masa iddahnya.

b) Talak Ba`in Kubro adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami untuk menikahi bekasisteri, kecuali setelah bekas isteri itu menikahi lai-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan masa iddahnya, (terjadi pada talak tiga)⁵².

3. Talak Sunni

Talak yang dijatuhkan ketika isteri telah suci dari haidnya, dan belum dicampuri sejak saat berhentinya haid tersebut.

4. Talak Bid`iy

Adalah talak dalam keadaan isteri sedang haid atau nifas atau dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri⁵³.

5. Talak Hakamain

⁵² Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media,2003), Cet. 1, h.196-199

⁵³ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 2, (Bandung : CV, Pustaka Setia, 1999) Cet.1, h.41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah talak yang diputuskan oleh juru damai (hakam) dari pihak suami maupun isteri⁵⁴.

6. Talak Battah

Yaitu talak yang dijatuhkan untuk selama-lamanya, dan tidak akan dirujuk kembali. Misalnya suami berkata, “ Engkau Ku ceraikan selama-lamanya.”⁵⁵

7. Talak Sharih

Talak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas dapat difahami sebagai pernyataan talak atau cerai ketika diucapkan.

8. Talak Kinayah

Yaitu talak yang menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. Talak dengan kata-kata kinayah bergantung pada niat suaminya artinya jika suami dengan kata-kata kinayah tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak yang dimaksudkan⁵⁶.

D. Rukun Dan Syarat Talak

Syariat Islam telah mengadakan beberapa rukun talak sewaktu menjatuhkan talak terhadap sang isteri. Diantara rukunnya adalah :

1) Kata-kata talak

a) Mutlak

Fuqaha mensyaratkan niat dan kata-kata yang tegas dalam talak, itu berdasarkan lahir syarak. Begitu juga fuqaha menyamakan kata-kata lahir dengan

⁵⁴ Ibid, h.43

⁵⁵ Ibid, h.47

⁵⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 2, (Bandung : CV Pustaka Setia,1999) Cet. h.43

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



kata-kata tegas. Jumhur fuqaha sependapat bahwa kata-kata tegas dan kata-kata sindiran⁵⁷.

b) Tidak terbatas

tidak lebih dari dua macam, yaitu kadang-kadang berupa pembatasan dengan kata-kata syarat dan kadang dengan kata-kata pengecualian.

2) Orang yang menjatuhkan talak

Fuqaha sependapat bahwa orang yang boleh menjatuhkan talak adalah suami yang berakal, dewasa, merdeka yakni tidak dipaksa⁵⁸. Kemudian mereka yang berselisih pendapat tentang penjatuhan talak oleh orang yang dipaksa (terpaksa), orang mabuk, orang yang sakit payah dan orang yang menjelang dewasa. Fuqaha berpendapat bahwa talak orang yang sakit payah dapat terjadi jika ia sehat kembali.

3) Isteri dapat dijatuhi talak

Mengenai isteri-isteri yang dapat dijatuhi talak, fuqaha sependapat bahwa mereka adalah isteri-isteri yang berada dalam ikatan perkawinan, atau isteri-isteri yang belum habis masa iddahnya pada talak raj'i. Mereka sependapat bahwa talak tiga terjadi pada orang-orang perempuan lain sama sekali, yakni talak yang dapat menceraikan.

Syarat Sah Talak

Jumhur ulama sepakat mengatakan talak yang dapat dilafazkan oleh suami adalah sah sekiranya memenuhi syarat-syarat berikut :

⁵⁷ Ibnu Rush, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007) Jilid 2 h.535

⁵⁸ DR. Mustofa Al-khin, Kitab Fikah Mazhab Syafi'e, (Kuala Lumpur, Pustaka As-Salam : 2005) Jilid 4, h. 861



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a) Berakal

suami yang menceraikan isterinya hendaklah berakal, waras dan tidak gila.

Suami yang gila tidak sah talaknya karena akalanya tidak berfungsi sepenuhnya dan tidak mampu membedakan antara baik atau buruk⁵⁹.

b) Baligh

Suami disyariatkan seorang yang baligh, tidak anak-anak. Talak yang dilafazkan oleh anak-anak tidak sah. Seperti sabda Rasulullah SAW :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَحْقُلَ

Artinya : "Diangkat qalam daripada tiga golongan : Daripada orang yang tidur sehingga dia sedar kembali, daripada anak-anak sehingga dia baligh dan daripada orang-orang yang gila sehingga dia kembali berakal"⁶⁰. (HR Abu Daud)

c) Kerelaan sendiri

Talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri adalah atas pilihan, kehendak dan kerelaan sendiri tanpa sebarang paksaan dari pihak manapun seperti mana sabda nabi Rasulullah SAW :

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya : " Ketentuan hukum dicabut dari umatku yang melakukan perbuatannya karena keliru, lupa dan dipaksa"⁶¹.

⁵⁹ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta, Pustaka Amani : 2007) jilid 2, h. 538

⁶⁰ Sunan Abu Daud

⁶¹ Muhammad Jawad Al-Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab terjemahan oleh Masykur A.B dan Afif Muhammad (Jakarta, Lantera: 2007), Cet 19, h.442



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekalipun seorang laki-laki itu sempurna syarat-syarat kelayakan diri untuk menceraikan seorang perempuan tetapi akibat cerai yang dijatuhkan itu adalah terikat dengan dua syarat :

- i. Perempuan diceraikan itu adalah isterinya yang sah
- ii. Ia masih dalam kekuasaannya sekalipun dalam iddah raj`i⁶².

Terdapat tiga syarat bagi suami yang menjatuhkan talak pada isteri :

- i. bahwa talak bagi keperluan yang masuk akal
- ii. bahwa isteri dalam keadaan suci, tidak disetubuhi
- iii. bahwa talak yang dijatuhkan berlainan dan tidak lebih dari satu⁶³.

E. Prosedur Talak Dalam Islam

Talak menurut hukum Islam adalah satu terapi atau satu obat hingga harus dipandang talak sebagai sebagian dari solusi dan tidak dipandang sebagai sebagian problema. Talak merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga apabila terjadi percekakan antara suami isteri. Bahkan sebagai salah satu syariat Allah SWT yang mesti diikuti oleh hambanya. Talak di sini mempunyai tujuan yang luhur disamping rahsia-rahsia yang terkandung di dalamnya.

Sabda Nabi SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

⁶² Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Kalam Mulia: 1990), Jilid 8, h.10

⁶³ Wabah Zuhaili, Al-Fiqh Islamiy Wa Adillatuhu, (Beirut Lebnon : Dar Al-Fikh)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “ dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda, : Perbuatan yang *halal* yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dari hadist diatas dapatlah diambil intisarnya dari kata ابغض yakni bermaksud yang paling dibenci, disimpulkan bahwa Islam tidak menyukai talak karena talak itu adalah perkara yang jelek. Namun kata halal diambil kesimpulan bahwa talak itu dibolehkan. Oleh kareana itu, ungkapan yang dimaksudkan syarak itu jelek tetapi mengandung maksud suatu saat dapat dipergunakan sebagai pintu keluar darurat⁶⁴.

Agar tidak termasuk kelompok yang dibenci Allah dan RasulNya, kita harus menempatkan talak pada posisi akhir ketika sudah tiada pilihan lain. Itu berarti harus melewati prosedur yang diajarkan dalam Islam sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah digariskan. Didalam Al-Quran sendiri telah memberi tuntutan secara rinci, suatu idikasi bahwa syariat ini mempunyai komitmen yang tinggi bahwa perkawinan berlangsung sekali untuk selamanya. Firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا
غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : “ bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (AN-Nisa: 21)

⁶⁴ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta : CV Pustaka Setia, 2000), h. 149



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, hanya hal yang memang sulit dihindari saja maka sebuah rumah tangga ini boleh diakhiri dengan talak. Dalam mengharungi kehidupan di alam perkawinan perlu disadari bahwa tidak semuanya menyenangkan. Namun, terkadang terperangkap dalam kesulitan dan kesusahan⁶⁵.

Karena itu, hendaklah kita hadapi semua dinamika hidup ini dengan menerimanya sebagai filosofi kehidupan bahwa segala sesuatu itu akan berganti dan segala sesuatu itu tidak kekal. Untuk itu, dibutuhkan kearifan dan kewajaran dalam menerima keadaan. Jadi apabila marah terhadap isteri wajar-wajar saja dan jangan berlebihan seperti merusak benda-benda yang payah diusahakan, menyakiti dan melukai isteri, bahkan sampai menjatuhkan talak hanya karena hal-hal yang sepele dan hanya timbul kebencian pada satu-satu perbuatan isteri, pelayanan yang kurang dan lain-lain. Dan telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa telah diingatkan untuk bertindak bijaksana dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan rumahtangga, bersabar sambil berharap suatu kebaikan akan timbul sesudahnya. Seperti mana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (An-Nisa : 19)

⁶⁵ Ibid, h.150



Ayat ini mengingatkan kepada kita, bagaimana cara menghadapi situasi

yang sukar dan untuk tidak berlebihan serta tidak terburu-buru menjatuhkan talak.

Setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Islam mengajar suami supaya memberi nasihat dan mengadakan penyelesaian yang terlebih baik terlebih dahulu terhadap isteri sebelum perceraian dilakukan. Sebagaimana firman Allah SWT :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (An-Nisa :34)

Dari keterangan dalil diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam itu sendiri telah mengatur bagaimana prosedur talak itu dijalankan. Prosedur talak dalam Islam adalah seperti berikut :

1. Berusaha Untuk Damai Atau Islah

Di dalam surat An-Nisa` ayat 128, Allah SWT berfirman :

وَإِن أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾



Artinya : *“dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (An-Nisa: 128)

Apa yang boleh diambil pengajaran dari ayat ini adalah bagaiman isteri bertindak menghadaoi suami yang marah. Dai harus berusaha mencari titik temu dan jalan damai atau bermusyawarah untuk mencari penyelesaian⁶⁶. Disamping itu, isteri harus introspeksi diri, mungkin kesalahan itu datangnya daripada isteri menyebabkan suami marah, kurang memperhatikan suami, atau terlalu sibuk dengan kegiatan social atau ekonomi. Mungkin juga ada tindakan atau perbuatannya yang tidak berkenan di hati suami, atau perlakuan yang kurang baik terhadap mertua atau lain-lain. Untuk itu isteri perlu berusaha memperbaiki kesalahannya. Melunakkan hatinya pada suami dan menyenangkan, mendinginkan suasana, bertutur sopan, berhias diri dan cara lainnya. Pertengkaran juga dapat terjadi akibat adanya kesalahan pada pihak suami sehingga memancing kemarahan isteri.

Jadi untuk memperbaiki situasi seperti ini, salah seorang dari suami atau isteri harus mengakui kesalahan atau berpura-pura mengakui kesalahan. Apabila salah seorang melakukan hal sedemikian, situasi mungkin akan berubah. Keadaan akan mula reda apalagi kedua-duanya mengaku khilafan.

2. Mengisolasiakn dan memberi pelajaran fizik

Apabila cara pertama tidak berhasil, dapat menggunakan cara kedua yaitu Al-Hajru, mengisolasiakan isteri seperti yang telah disebutkan dalam fiman Allah SWT :

⁶⁶ Ibid, h. 152



الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “ kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (An-Nisa : 34)

Maksudnya adalah menahan diri untuk tidak tidur bersama isteri, sampai muncul gejala perbaikan, dengan harapan timbulnya penyesalan dan tentunya timbul kerinduan. Kalau memang ada seberkas harapan yang menagarah kepada kebaikan, suami tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkan isterinya.

Dalam kebiasaan masyarakat isolasi dilakukan dengan menyerahkan isteri kepada orang tuanya supaya suasana lebih dingin. Walaupun fungsinya sama, tindakan yang terakhir ini dapat mengundang masalah lain yang mengeruhkan suasana. Dengan isolasi isteri pada rumah sendiri, hal itu lebih dekat dengan kemaslahatan.

Apabila dengan cara ini tidak berkesan atau belum berhasil, suami dapat memberi pengajaran fisik, memukul isteri menurut ash-San`any yaitu bukan pukulan seperti memukul hamba atau hewan. Oleh karena itu, kata harus ingat esensi tindakan tersebut. Jika esensinya mencari kebaikan, pukulannya tidak boleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menyebabkan, apalagi menimbulkan luka cacat fisik. Dengan demikian kalau kedua pihak baik kembali, hal itu tidak menjadi beban ekonomis, apalagi kalau marahnya isteri tadi karena alasan ekonomi.

3. Mengangkat hakamain (dua juru runding)

Apabila masalah yang timbul sudah terlalu tinggi dan kondisi emosi yang sudah berlebihan sehingga sulit bagi mereka mengatasi masalah sendiri, maka undanglah juru runding (hakam) dari kedua belah pihak keluarga. Hakam diperlukan jika tidak dapat lagi berfikir jernih serta tingkat emosi dan egoitis sudah memuncak, hati sudah masing-masing panas maka pada hal situasi yang serumit tersebut hanya mungkin diatasi dengan cara sebegini.

Al-Quran menyebut juru runding ini sebagai hakamain (dua hakam) dan pencegah perselisihan. Sebagaimana telah dijelaskan AllahSWAt dalam firmanNya :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (An-Nisa : 35)

Menurut Imam Malik, apabila permasalahan tersebut sudah sampai tingkat hakamain, keputusan digantung padanya. Hal ini karena pada hakikatnya kedua belah pihak telah menyerahkan secara penuh seluruh perkara tersebut. Imam Syafi' berpendapat bahwa, namun mensyaratkan mereka yang berperkara memang menyerahkan seluruh perkaranya kepada hakamain termasuk untuk menyelesaikannya. Kalau menurut hakamain tadi, perpisahan adalah jalan terbaik,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



biarpun pahit perpisahan tetap dilakukan karena itu adalah jalan penyelesaian yang sebaiknya untuk kedua belah pihak.

F. Hikmah Talak

Seharusnya jalan untuk bercerai itu diberi kepada pasangan suami istri dan jangan ditutup sama sekali karena akan mengakibatkan bahaya. Suami isteri yang terus dan terpaksa bersatu justeru akan bertambah buruk.

Adapun hikmah talak yaitu :

1. Menjernihkan kehidupan bekas suami dan istri yang keruh.

Contoh : Pasangan suami istri yang salah satunya mandul jika mereka berpisah maka kemungkinan bisa mempunyai keturunan bagi yang sihat. Karena anak atau keturunan merupakan suatu yang penting bagi pasangan suami isteri⁶⁷.

2. Menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak (bekas suami dan isteri)

Contoh : Jika diantara mereka sudah tiada kecocokan lagi dan sering terjadi penentangan serta pertengkaran yang menimbulkan bahaya, maka talak merupakan jalan penyelesaian yang dianggap sesuai agar tidak lagi merasa sengsara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁷ Ahmad Shiddiq, *Hukum Talak Dalam Agama Islam* (Surabaya:Putra Pelajar, 2001) .21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur perceraian di Negara Indonesia dan Malaysia terdapat persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah kedua-dua Negara menetapkan bahwa lafaz cerai haruslah dilakukan di dalam sidang pengadilan dan di hadapan hakim. Apa-apa yang dilakukan di luar pengadilan adalah tidak sah. Perbandingan yang timbul pula adalah Negara Malaysia mempunyai undang-undang yang mengatur mengenai kesalahan apabila melafazkan talaq di luar pengadilan manakalah Negara Indonesia hanya menggunakan peraturan yang menyatakan talak hanya sah dilakukan di sidang pengadilan.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila perceraian yang dilakukan dilihat pengadilan sama ada di Indonesia dan Malaysia mempengaruhi jumlah perceraian di sesebuah Negara. Hal tersebut karena di Negara Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Apabila sesuatu perceraian itu dilakukan diluar sidang pengadilan maka akibat yang akan ditanggung oleh pasangan suami dan isteri tersebut adalah perceraian itu tidak tercatat, masih suami isteri yang sah menurut hukum positif, tidak dapat melaksanakan perkahwinan selanjutnya secara sah menurut hukum positif. Manakala di Negara Malaysia, apabila melakukan perceraian di luar mahkamah pasangan harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memaklumkan kepada mahkamah dalam tempoh tujuh hari dan mahkamah akan menjatuhkan denda kepada pasangan tersebut sebanyak RM 1000.

Di dalam Islam perceraian adalah hak suami, isteri dapat meminta cerai dari suaminya dengan cara memberi tebusan atau biasanya disebut dengan fasakh. Jadi dalam Islam tiada aturan yang menyatakan bahwa cerai harus dilakukan dihadapan sidang pengadilan. Sebagaimana yang diharuskan oleh hukum positif bagi kedua-dua Negara yakni Indonesia dan Malaysia. Namun, hukum positif yang diciptakan guna penyesuaian perkembangan zaman yang semakin maju, dengan tidak mengabaikan Al-Quran dan Hadist. Sama juga dengan halnya perkahwinan sirri dimana menurut hukum Islam pernikahan sah asalkan semua syarat dan rukun nikah terpenuhi. Hukum diciptakan agar masyarakat hidup lebih teratur, dan dengan perceraian di Pengadilan setiap individu dapat terhindar dari hal-hal yang membawa kepada kerugian-kerugian akibat dari perkahwinan yang resmi dari hukum positif khususnya di Indonesia. Dengan kata lain, Negara Indonesia melakukan undang-undang tersebut karena ingin menutup jalan yang membawa kepada satu keburukan (addu dzari'ah), karena perceraian yang dilakukan dihadapan Pengadilan dapat memberikan kepastian hukum mengenai talak yang dilafazkan dan Pengadilan menerbitkan akta cerai yang dapat digunakan untuk pernikahan selanjutnya secara resmi menurut hukum Islam dan juga hukum positif.



B. Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi mencegah atau meminimalkan terjadinya perceraian talak di luar pengadilan khusus di Negara Indonesia, diharapkan semua pihak pemerintah mahupun masyarakat termasuk lembaga-lembaga social keagamaan. Untuk sentiasa berperan aktif dalam memberi bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pentingnya sebuah kesiapan dan kemampuan seseorang sebelum memasuki jinjang pernikahan yakni mampu secara fizik, mental mahupun materi.
2. Bagi meminimalakan kasus talak di luar mahkamah khususnya Di Malaysia, undang-undang sedia ada haruslah di digubah kepada denda yang lebih tinggi. Contohnya meningkatkan denda daripada RM 1000 kepada RM 3000 karena ini mungkin menakutkan masyarakat daripada melakukan talak tanpa kebenaran mahkamah.
3. Hendaknya ada upaya pada diri masing-masing masyarakat untuk memperkaya ilmu pengetahuan, salah satunya tidak malu bertanya kepada yang lebih memahami hukum. Diharapkan semua masyarakat agar lebih terbuka menerima hukum Negara yang berlaku, karena hukum dicipta agar kehidupan kita semua menjadi lebih baik dan terarah.
4. Bagi masyarakat khususnya pasangan suami isteri yang tidak lagi mampu mempertahankan bahtera rumah tangga yang dibina hendaklah melakukan proses perceraian menurut jalur hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Negara masing-masing karena bercerai melalui Peradilan Agama lebih mendatangkan kebaikan kepada semua pihak yang terlibat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cet 2, Jakarta : Kencana , 2012
- Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subusalam Jilid, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995) Cet.1
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, cet 4 , Jakarta : Kencana, 2010
- Abdul Kadir bin Haji Muhammad, Sejarah Penulisan Undang-Undang Selangor, (Selangor: Pustaka Ehsan, 2002)
- Ahmad Shidik, Hukum Talak Dalam Agama Islam, (Surabaya: Putera Pelajar, 2001) Cet. 1
- Ahmad Mudjab Mahalli, Wahai Pemuda Menikahlah, cet.1 (Yogyakarta : Menara Kudus, 2002)
- Ahmad Ibrahim, Common Law In Malaysia, dalam Ketentuan Jurnal Undang-Undang Malaysia, (Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka 1989), jilid 1
- Abi Muhammad A`bdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Al-Mughni, (Mesir: Maktabah al-Jumhurriyyah al-Arabiyah) Juzuk 7
- Al-Imam Abi` Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibn al-Mugir al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Kitab An-Nikah Beirut: Dar Al-Fikh, 1981, VI
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkahwinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Devan Redaksi Ensiklopedia Islam.(ed), Ensiklopedia Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet.4, Jilid 5
- Di kutip dari Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama
- Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departmen Agama, 2001
- Dr. Musthofa Al-Khin, Kitab Fiqih Mazhab Syafi`e, (Kuala Lumpur, Pustaka Salam Sdn Bhd: 2005), Jilid 4
- Drs. h, Nur Mujib, Mh, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, [http://www.pa-jakarta.go.id/artikel/236-ketika-suami-mengucapkan-talak-diluar-sidang-pengadilan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor](http://www.pa-jakarta.go.id/artikel/236-ketika-suami-mengucapkan-talak-diluar-sidang-pengadilan-Jabatan-Kehakiman-Syariah-Negeri-Selangor) (2017), *Jurnal Hukum*, Jilid 13 Bahagian 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Drs. Amad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000) Cet.4,
- Hertina, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara*, Riau : Suska Press, 2014
- https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia, 11oct2018, 111 9am
- Hamid Jusoh, *Pemakaian Undang-Undang Islam Kini dan Masa Depan*nya di Malaysia dala al-Ahkam, *Undang-Undang Malaysia Kini*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), Jilid 1
- Ibnu Rush, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007) Jilid 2
- Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor (2017), *Jurnal Hukum*, Jilid 7
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Humaniora Press, 1992
- Mahkamah Syariah Selangor, *Enakmen Undang-Undang Islam Negeri Selangor 2003 Dan Kaedah-Kaedah* , Selangor: MCLJ, 2003
- Mahkamah Syariah Shah Alam, Selangor, Carta Organisasi Tahun 2013, (Selangor: Percetakan Nasional Berhad, 2019)
- Maria Ulfah Subadyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkahwinan*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981)
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004)
- Muhammad Kamal Hassan, *Modernisasi Indonesia Respon Cendaiawan Muslim*, (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Muhammad Amin Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar A'la al-Durr al-Mukhtar*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1966) Juzuk 3
- Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Buku 1, (Jakarta : Pustaka Azam, 2003) Cet 1
- Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* terjemahan oleh Masykur A.B dan Afif Muhammad (Jakarta, Lantera: 2007), Cet 19
- Nah Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, (jakarta: Ghalia Indonesia, 1992)
- Nuril Qoodar, *Perceraian Di Luar Pengadilan Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kabupaten Sleman*, 2009,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT Pradnya Pramita),
- R. Soetedjo Prawirohamidjojo, *pluralisme Dalam Perundangan-Undangan Perkahwinan di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988)
- Rahmat Hakim, Hukum Perkahwinan Islam, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), Cet.1
- Sidi Muhammad Al-Zarqani, Syarh Muwatta` al-Imam Malik, (Kaherah : Al-Matha`ah al- Khairiyyah) Juzuk 3
- Syaikh Hasan Ayub, Fikih Keluarga cet. 5, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008
- Sjamsu Alam, *Usia Perkahwinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkahwinan Indonesia*, (Universitas Gajah Muda, 2011).
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Kalam Mulia: 1990), Jilid 8
- Syeikh Muhammad Al-Khatib Al-Syarbani, Mughni Al-Muhtaj, (Mesir : Matba`ah Mustafa al- Babi al-Halabi wa Awladuh, 1958), juzuk 3
- Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 2, (Bandung : CV, Pustaka Setia, 1999) Cet.1 Sunan Abu Daud
- Undang-Undang No. 1 Tentang Perkahwinan Tahun 1974,
- Wabah Zuhaili, Al-Fiqh Islamiy Wa Adillatuhu, (Beirut Lebnon : Dar Al-Fikh)
- Wahidin, Pengantar Sejarah Peradilan Islam (Riau : Suska Press, 2014),
- Wawancara, Puan Noor Huda Binti Roslan, (Ketua Pendaftar, Mahkamah Syariah Shah Alam, Selangor), 22 March 2019
- Wawancara bersama Ibu Bunga (nama samaran) di Peradilan Agama Pekanbaru Tingkat 1, hari Isnin 2/9/2019.
- Wawancara, Puan Rosmahwati Binti Shamsuri , (Pembantu Hakim, Mahkamah Syariah Shah Alam, Selangor), 22 March 2019
- Wawancara Tuan Mohammad Adib Bin Husain, (Hakim Syari`e 2, Mahkamah Syariah Shah Alam, Selangor), 22 March 2019
- Yayan Sopyan, *Islam Negara; Transformasi Hukum Perkahwinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PROSEDUR PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KOMPERATIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI SELANGOR 2003)** yang ditulis oleh :

Nama : **MOHAMAD NAZREEN NAIM BIN MANSOR**
NIM : 11623104540
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 6 November 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Darmawan Tia Indrajaya, MA

Sekretaris
Marzuki, MA

Penguji I
Ahmad Adri Riva'i, MA

Penguji II
Dr.H. Erman Ghani, M.Ag

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum


Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/25491
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6819/2019 Tanggal 21 Agustus 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : MOHAMAD NAZREEM NAIM |
| 2. NIM / KTP | : 11623104540 |
| 3. Program Studi | : PERBANDINGAN MADZHAB |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PROSEDUR PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KOMPERATIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI SELANGOR |
| 7. Lokasi Penelitian | : PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Agustus 2019



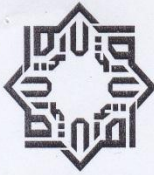
Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5304/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MOHAMAD NAZREEN NAIM BIN MANSOR
N I M : 11623104540
Jurusan : PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **15 MEI 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 12 Juni 2019

Dekan,



DR/Drs H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



جباتن كحاکيمن شریعه سلاڠور دارالاحسان

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR DARUL EHSAN

BANGUNAN MAHKAMAH SYARIAH SULTAN IDRIS SHAH,
PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5,
40000 SHAH ALAM,
SELANGOR DARUL EHSAN
TEL : 03-55191291, 55191294, 55113708, 55191304
FAKS : 03-55105620, 551260F3



Laman Web: www.jakess.gov.my

KEPADA

MOHAMAD NAZREEN NAIM BIN MANSOR,
NO. 7, LORONG POKOK SENA INDAH 5,
TAMAN POKOK SENA INDAH,
13300 TASEK GELUGOR, PULAU PINANG.

SURAT KELULUSAN PERMOHONAN DARIPADA
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR
BANGUNAN MAHKAMAH SYARIAH SULTAN IDRIS SHAH
PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

Ruj. Kami: JAKESS 600-6/1/3 Jld.9 (55)
Tarikh: 18/3/2019

PERMOHONAN UNTUK MENGAKSES MAKLUMAT DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR DI BAWAH ENAKMEN KEBEBASAN MAKLUMAT (NEGERI SELANGOR) 2011

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa permohonan tuan/puan untuk mengakses maklumat di Jabatan ini **No. Permohonan 298** diluluskan / tidak diluluskan berdasarkan Jadual Kedua, Peraturan-Peraturan yang tersebut seperti Jadual 2 di bawah:-

Bil.	Perihal	Fi (RM)	Ditandakan Oleh Pegawai Maklumat
1	Mencari dan mendapatkan maklumat dan memulangkan maklumat ke tempat simpanan	10.00	(/)
2	Mempertimbangkan dan membuat keputusan berhubung permohonan yang dibuat (termasuk konsultasi)	10.00	(/)
3	Memantau pemeriksaan maklumat oleh pemohon	10.00	(/)
4	Menyewa peralatan atau kemudahan untuk membolehkan pemohon melihat atau mendengar cakera padat, filem atau kaset	Kos Sebenar	()
5	Mengendalikan peralatan untuk membuat salinan cakera padat, filem atau kaset untuk membolehkan pemohon melihat atau mendengar cakera padat, filem atau kaset	10.00	()
6	Perkhidmatan-perkhidmatan lain bagi membolehkan pemohon mengakses maklumat secara fizikal	Kos Sebenar	()
7	Fotokopi (jika ada)	(a) 20 sen setiap muka surat (b) Kos sebenar	()
8	Salinan cakera padat, filem atau kaset	Kos sebenar	()

"Membangun Bangsa Memakmur Negeri"

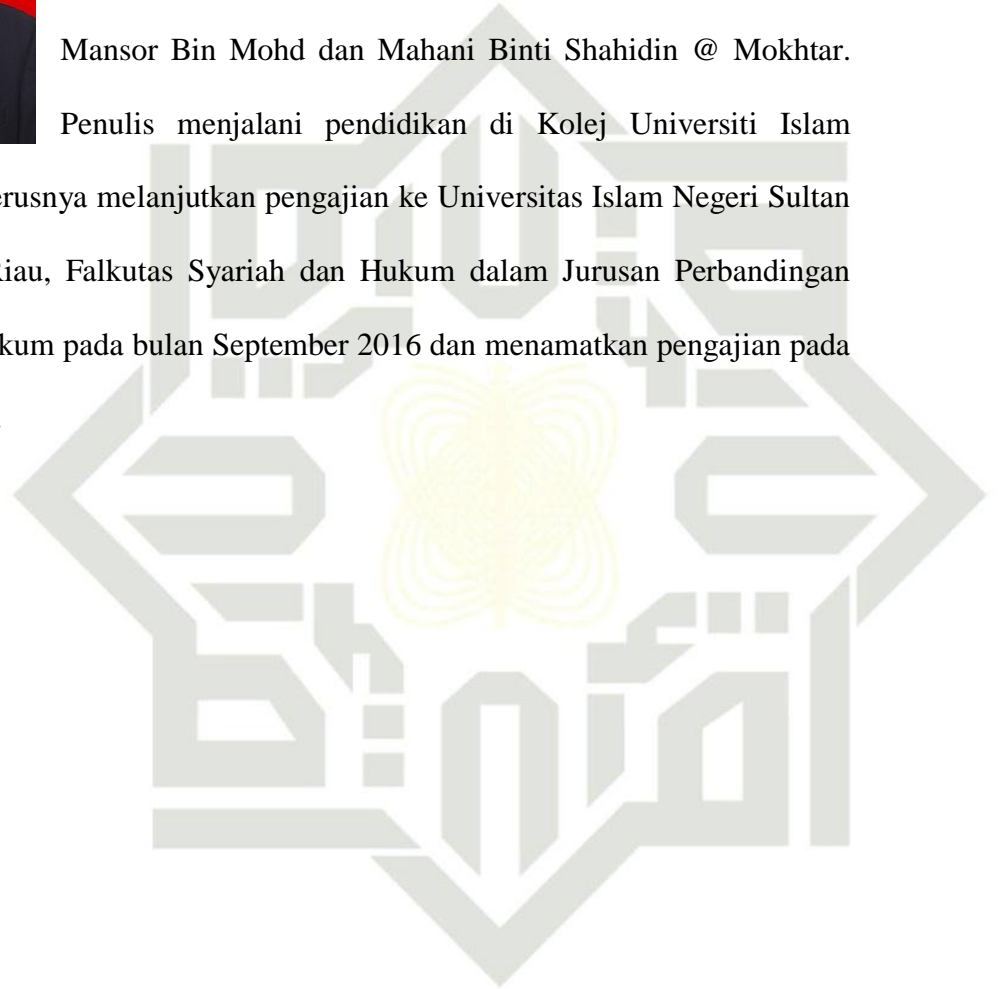




RIWAYAH HIDUP

Mohamad Nazreen Naim Bin Mansor lahir pada tanggal 28 Mei 1994 di Pulau Pinang Malaysia. Merupakan anak pertama dari 4 bersaudara yang lahir dari pasangan Mansor Bin Mohd dan Mahani Binti Shahidin @ Mokhtar.

Penulis menjalani pendidikan di Kolej Universiti Islam Melaka dan seterusnya melanjutkan pengajian ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Falkutas Syariah dan Hukum dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada bulan September 2016 dan menamatkan pengajian pada Desember 2019.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.